

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kota Banjarmasin

Banjarmasin adalah sebuah ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kota ini mempunyai luas wilayah sekitar 98.46 km², dan 692.793 penduduk yang terdaftar pada tahun 2017. Dengan kepadatan penduduk 7.036/km², Banjarmasin adalah kota terpadat di Kalimantan Selatan. Dijuluki kota seribu sungai, Banjarmasin terletak di sebuah delta dimana sungai Barito dan Martapura bertemu. Selama beberapa periode, Banjarmasin telah menjadi pusat untuk pengiriman batu bara, karet, dan kayu, baik dalam maupun luar negeri.

Di masa lalu, rute transformasi dan aktivitas ekonomi di Banjarmasin terpusat di tepi sungai. Seiring waktu, pembangunan bergerak ke daratan, dan sampan-sampan mulai digantikan oleh mobil dan sepeda motor. Area tepi sungai tak lagi berfungsi sebagai pusat kegiatan, namun berubah menjadi halaman belakang pemukiman. Sementara, jalan-jalan kini berfungsi sebagai akses kota yang utama. Akibatnya, kualitas sungai kian menurun, seperti yang terlihat dari aliran sungai yang semakin sempit,

sungai berlumpur, serta hilangnya daerah sungai yang karena berbagai pembangunan seperti gedung dan lahan parkir.

Tabel 4.1

Statistik Dasar Kota Banjarmasin

STATISTIK DASAR KOTA	
Area	98.46 km ²
Populasi	692.793 people
Kepadatan	7.036 pop/km ²
KEPALA KELUARGA	
Kecamatan	5 Kecamatan
Kelurahan	52 Kelurahan
Rukun Warga	117 Rukun Warga
Rukun Tetangga	1.657 Rukun Tetangga

Sumber : Survei Kota Ramah Disabilitas Banjarmasin (2018)

Sebagai anggota dari Jaringan Walikota untuk kota inklusif atau *Network of Mayors for Inclusive Cities* (NMIC), Banjarmasin telah menetapkan peta jalan untuk kota inklusif Banjarmasin. Selain komitmen awal, kota ini telah mengambil langkah-langkah nyata untuk menanamkan agenda inklusifitas dalam kebijakan dan peraturan daerahnya seperti :

- a) Peraturan Kota Nomor 9 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- b) Peraturan Walikota Nomor 352 Tahun 2016, untuk membentuk Forum Antarlembaga Kota Banjarmasin untuk Disabilitas.

Forum Antarlembaga Untuk Disabilitas mengawasi dan membantu dalam persiapan anggaran lokal, dan memantau, serta memandu pemerintah kota untuk mensosialisasikan isu-isu disabilitas dalam aktivitas mereka. Banjarmasin sedang menguji berbagai ide dan prakarsa untuk menanggapi kebutuhan yang semakin tinggi terhadap fasilitas yang lebih ramah disabilitas seperti sekolah inklusif, fasilitas kesehatan masyarakat yang ramah disabilitas, jalur ramah disabilitas dan ram gedung umum. Saat ini, kota ini berencana untuk mengembangkan dua lingkungan inklusif di dalam kota, Kuin Selatan dan Kelayan Selatan.

Banjarmasin juga menunjukkan pertumbuhan keterlibatan masyarakat sipil yang menangani dan mempromosikan kebijakan dan pembangunan ramah disabilitas. Ini termasuk Sentra Advokasi Perempuan Difabel (SAPDA), dan organisasi-organisasi Penyandang Disabilitas lainnya, seperti Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni Banjarmasin), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin Banjarmasin), dan *National Paralympic Committee* (NPC Banjarmasin).

Terlepas dari inisiatif pemerintah lokal dan advokasi masyarakat sipil yang baik, hak-hak disabilitas sebagian besar masih belum terpenuhi dan terus menjadi tantangan besar bagi kota ini. Meski Banjarmasin telah melakukan upaya yang nyata untuk membangun infrastruktur yang mudah diakses di jalan-jalan utamanya. Sebagian besar wilayah kota masih terputus, di tingkat lingkungan warga kehilangan bagian akhir karena investasi yang setengah-setengah dalam infrastruktur.

Badan pemerintahan dan masyarakat masih kurang memiliki kesadaran tentang prinsip inklusifitas dan standar aksesibilitas dalam merencanakan, merancang, dan melaksanakan infrastruktur publik. Partisipasi politik dan suara penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan tata kota di tingkat kelurahan juga kurang. Mobilitas begitu terhambat di lingkungan warga, sehingga banyak penyandang disabilitas yang tak pernah meninggalkan rumah. Perlakuan terhadap penyandang disabilitas yang menciptakan hambatan bagi inklusi sosial.

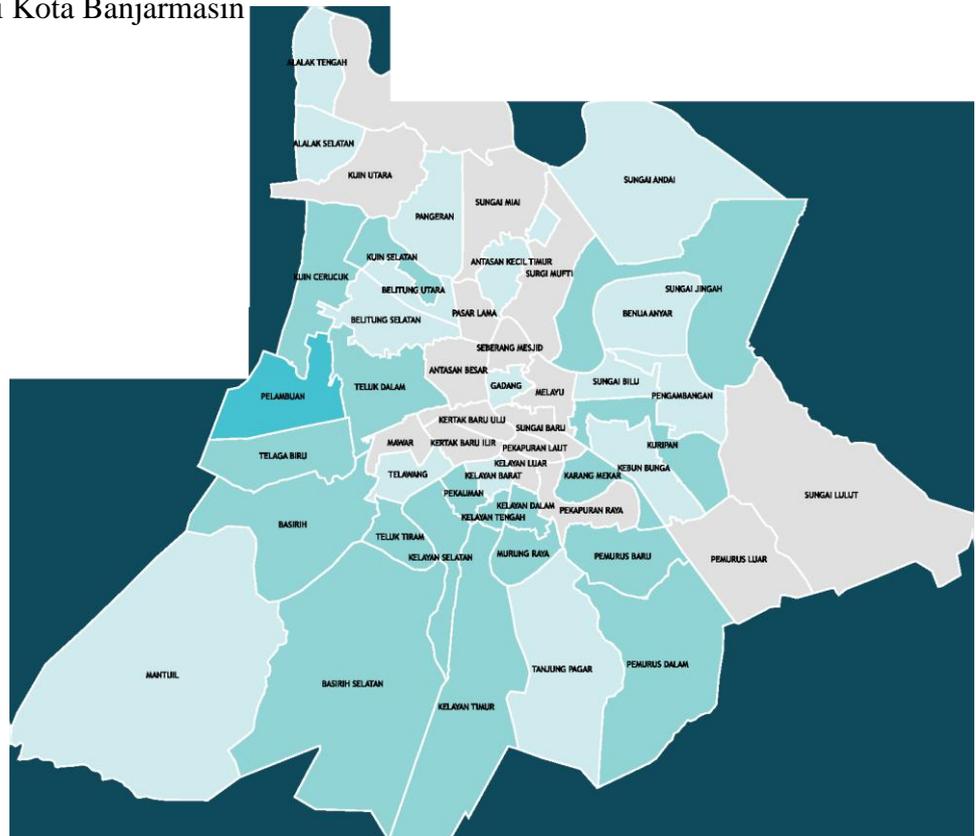
Dari survei menunjukkan prasangka yang ada senantiasa mengucilkan penyandang disabilitas dari masyarakat, termasuk disabilitas membawa aib bagi keluarga, atau lebih buruk; kutukan, sihir, dan hukuman dari Tuhan. Akibatnya, penyandang disabilitas sering merasa rendah diri dan dikucilkan dari pelayanan public, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Dengan kata lain, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

2. Profil Penyandang Disabilitas di Banjarmasin

a. Deskripsi Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin

Gambar 4.1

Deskripsi Kota Banjarmasin



Sumber : Penyebaran Penyandang Cacat di Setiap Kelurahan di Banjarmasin (2019)

Dari total 52 kelurahan, Pelambuan memiliki jumlah tertinggi penyandang disabilitas, yaitu 252 orang. Area ini menawarkan akses yang relatif lebih mudah ke fasilitas publik, seperti pusat pelatihan,

sekolah kebutuhan khusus, pusat kesehatan masyarakat, daerah industri dan pelabuhan.

Penelitian tersebut mendokumentasikan 3.897 penyandang disabilitas yang tinggal di Banjarmasin, yang mewakili 0.56% dari total populasi. Dari lima kabupaten di kota ini, Banjarmasin Barat (1052) dan Banjarmasin Selatan (1190) adalah rumah bagi lebih dari setengah jumlah total penyandang disabilitas di Banjarmasin, sementara sisanya tinggal di kabupaten disekitarnya, yaitu Banjarmasin Tengah (490), Banjarmasin Timur (579), dan Banjarmasin Utara (586).

Dari dokumentasi yang ada, ada sekitar 3.897 penyandang disabilitas yang tinggal di Banjarmasin, yang mewakili 0.56% dari total populasi. Dari lima kecamatan di kota ini, Banjarmasin Barat (1052) dan Banjarmasin Selatan (1190) adalah rumah bagi lebih setengah jumlah total penyandang disabilitas di Banjarmasin, sementara sisanya tinggal di kecamatan sekitarnya, yaitu Banjarmasin Tengah (490), Banjarmasin Timur (579), dan Banjarmasin Utara (586).

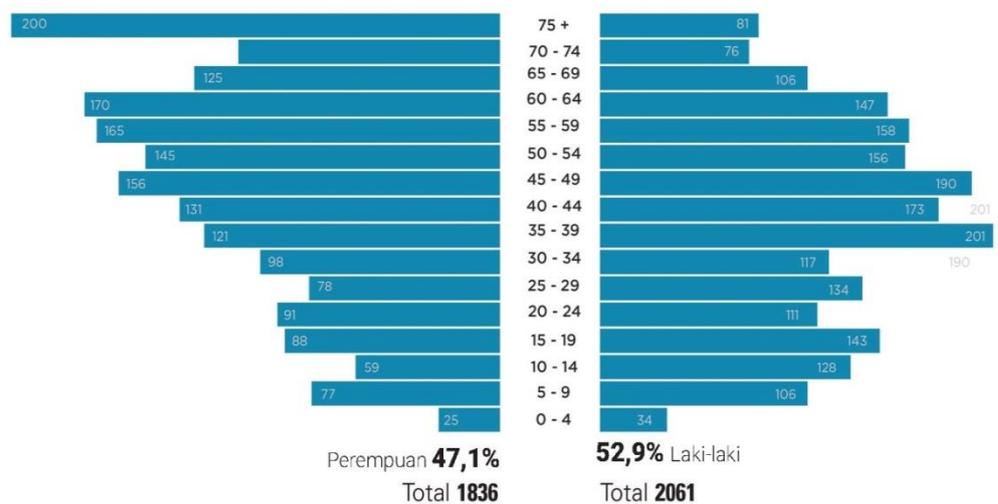
Penyandang disabilitas terkonsentrasi di bagian barat dan selatan kota di pinggir sungai, dimana paling banyak terdapat aktivitas perekonomian. Terdapat juga konsentrasi penyandang disabilitas yang lebih tinggi di daerah padat penduduk seperti Kelayan Tengah, Kelayan Barat, Kuin Cerucuk dan Kelayan Selatan karena berdekatan

dengan fasilitas umum dan perumahan. Banyak penyandang disabilitas tinggal didaerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, seperti pelambuan, Kelayan Dalam dan Kelayan Tengah, kemungkinan karena biaya sewa yang relatif terjangkau.

Ada 55,7% dari penyandang disabilitas di atas usia 50 tahun adalah perempuan. Disabilitas dan usia mereka menjadikan mereka sangat tergantung pada dukungan keluarga.

Gambar 4.2

Usia dan Jenis Kelamin Penyandang Disabilitas



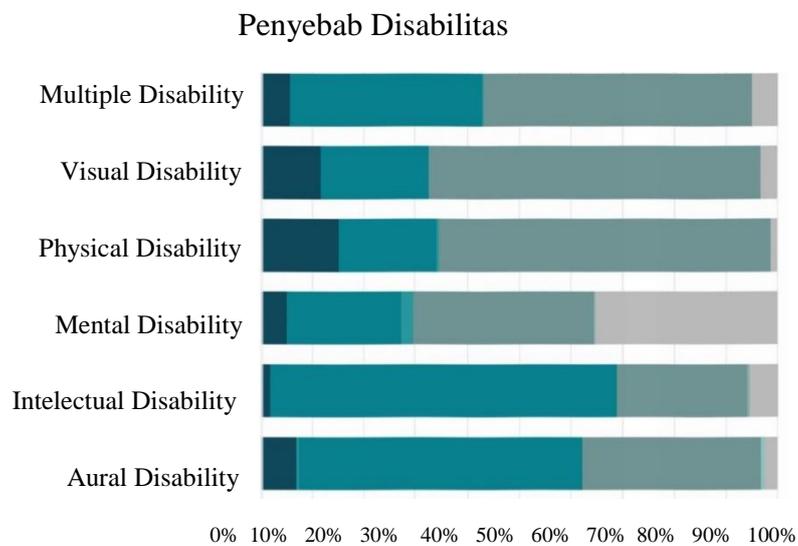
Sumber : Penyandang disabilitas berdasarkan usia dan kelamin

Adapun jenis dan penyebab disabilitas memberikan laporan dengan gambaran pengelompokan disabilitas menjadi lima jenis : fisik, mental, intelektual, aural, dan visual, sesuai dengan klasifikasi nasional dan sebagian lagi penyandang disabilitas memiliki beberapa kondisi.

Secara total, terdapat 1.568 orang dengan disabilitas fisik, 861 orang dengan disabilitas mental, 499 orang dengan disabilitas ganda, 4888 orang dengan disabilitas aural, 274 orang dengan disabilitas intelektual, dan 207 orang dengan disabilitas visual di Banjarmasin. Disabilitas fisik adalah kategori yang paling umum di Banjarmasin dengan mayoritas kategori ini berusia di atas 50. Dari data yang di himpun dari berbagai sumber, mengelompokkan tujuh penyebab disabilitas di Banjarmasin, termasuk yang disebabkan oleh kecelakaan, bawaan lahir, konflik, penyakit, kebakaran, bencana alam dan masalah pribadi. Sebagian besar disabilitas fisik di Banjarmasin (65,1% dari penyandang disabilitas fisik) disebabkan oleh penyakit, sedangkan disabilitas mental (34,4% diantaranya) disebabkan oleh masalah pribadi. Untuk penyandang disabilitas aural, intelektual dan ganda di Banjarmasin disebabkan oleh bawaan lahir, dan untuk penyandang disabilitas visual disebabkan oleh penyakit. Gangguan terkait dengan penuaan dan berbagai kondisi kesehatan.

Sebagian besar disabilitas fisik di Pelambuan berkaitan dengan tempat kerja dan kecelakaan lalu lintas. Di Kuin Cerucuk, dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi kedua, 52% disabilitas adalah karena penyakit, dan Basirih, dengan populasi penyandang disabilitas tertinggi ketiga, mayoritas berusia di atas 50 tahun atau lebih, dan disabilitas mereka berkaitan dengan penyakit.

Gambar 4.3



Sumber : Kota Banjarmasin, Sebuah Profil Kota Ramah Disabilitas

b. Mata Pencaharian Ekonomi dan Pekerjaan

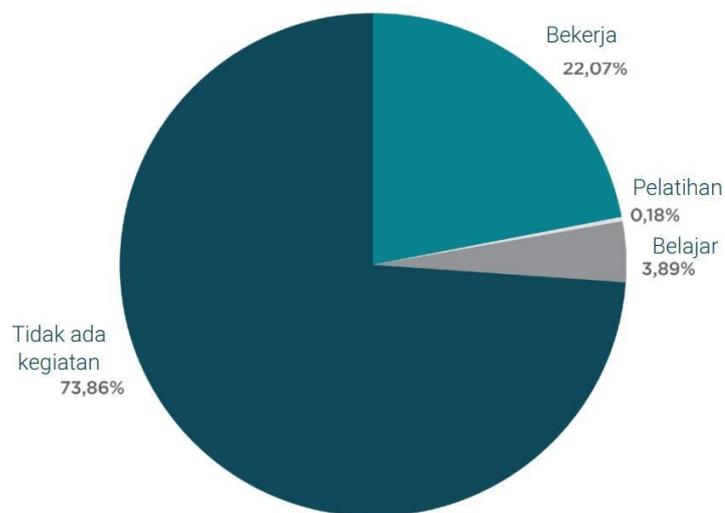
Penyandang disabilitas terus menghadapi rintangan besar untuk memastikan mata pencaharian ekonomi dan pekerjaan mereka. Tingkat pengangguran untuk penyandang disabilitas di usia produktif (15 sampai 64 tahun) di Banjarmasin di atas 70%. Penyandang disabilitas mengalami prasangka dari masyarakat yang berasumsi mereka memiliki kapasitas dan keterampilan yang lebih rendah. Terlebih lagi, pemberi kerja seringkali tidak mau berinvestasi lebih

untuk akomodasi dan fasilitas pendukung yang wajar, seperti aksesibilitas fisik, dukungan kesehatan dan jaminan sosial.

a. Status Aktivitas Penyandang Disabilitas Berdasarkan Usia Produktif (15-65) di Banjarmasin

Gambar 4.4

Aktivitas Penyandang Disabilitas



Gambar : Kota Banjarmasin, Sebuah Profil Kota Ramah Disabilitas

- a) 73,86% tidak ada kegiatan.
- b) 22,07% bekerja.
- c) 3,89% belajar.
- d) 0,18% pelatihan.

Hanya satu dari tiga penyandang disabilitas yang produktif, dan lebih dari 73% penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan.

22,7% penyandang disabilitas yang bekerja direkrut untuk buruh dan ritel.

Dari berbagai kategori disabilitas, penyandang disabilitas fisik memiliki tingkat pendapatan tertinggi, namun rata-rata hampir 94% penyandang disabilitas yang bekerja hanya mendapat penghasilan di bawah standar upah minimum daerah yaitu IDR 2.500.000 atau kurang dari USD 177 per bulan. Tingkat pendapatan ini lebih rendah dari rata-rata biaya hidup di Banjarmasin. Pengangguran sudah lazim berada di kalangan penyandang disabilitas dengan 67% dari mereka bekerja kurang dari 40 jam per minggu, tiga persen lainnya memiliki karir profesional, seperti guru, asisten administrasi, pekerja sosial, koki, politisi, pegawai pemerintah, seniman, dan atlet.

Pemerintah pusat telah menunjukkan dukungan yang makin besar dengan mendeklarasikan sebuah kuota kerja bagi penyandang disabilitas melalui UU Penyandang Disabilitas (8/2016) untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi tenaga kerja penyandang disabilitas. Namun, kebijakan afirmatif masih kurang dan menerapkan kebijakan tersebut bahkan lebih rumit lagi karena tidak diterapkan secara memadai dalam perekrutan. FGD menemukan bahwa persyaratan pendidikan yang ditunjukkan lewat ijazah menghadirkan hambatan terbesar bagi penyandang disabilitas di Banjarmasin ketika melamar pekerjaan. Akibatnya banyak penyandang disabilitas tetap menganggur meskipun memiliki

keterampilan yang memenuhi syarat untuk bekerja. Pemilik kerja saat ini praktis melewatkan sekelompok tenaga kerja yang belum terpakai namun berbakat. Inilah waktunya untuk mengakui bahwa disabilitas adalah keanekaragaman dan memperluas pilihan pekerjaan untuk penyandang disabilitas menjadi penting untuk memastikan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang mandiri dan bermartabat.

2. Pemerintah Kota Banjarmasin dan Perannya

Banjarmasin menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tinggi Walikota untuk kota inklusi ke-8 Asosiasi Pemko Seluruh Indonesia (APEKSI), di Best Western Kindai Hotel, Banjarmasin, Kamis (3/10/2019). Dalam acara pertemuan tersebut membahas tentang kemajuan kota inklusi, di kota masing-masing demi menyetarakan hak-hak para penyandang disabilitas setiap kota.

Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina mengungkapkan, Banjarmasin saat ini bersama dengan kota-kota lain sedang menuju kota inklusi. Menurutnya, Banjarmasin sudah memiliki road map untuk menuju kota inklusi tersebut sejak 2018 lalu. Ia mengatakan, pertemuan tersebut sebagai ajang *sharing* bersama dengan kota-kota lain. Selain bertambahnya kota baru yang bergabung menjadi anggota APEKSI.

Ia berharap bisa segera menyelesaikan aspek untuk pembangunan kota inklusi. “Ada 3 aspek, yaitu regulasi, pembangunan fasilitas dan layanan publiknya, serta kepedulian dan penerimaan dari masyarakat, jadi seluruh program itu tidak keluar dari kerangka itu. Sedangkan untuk fasilitas, kita sudah punya trotoar ramah difabel, kemudian kantor layanan publik yang memiliki akses ramah difabel, termasuk juga kita memiliki kampung inklusi di Kelurahan Pelambuan,” (Ibnu Sina)

Sementara itu, *Specialist Social and Human Sciences Unit* UNESCO, Irakli Khodeli berterima kasih kepada Walikota Banjarmasin atas inisiatif untuk menjadikan Banjarmasin sebagai kota inklusi.

Saya bekerja untuk UNESCO dalam mempromosikan inklusi sosial dan saya ingin menyampaikan terima kasih saya atas nama UNESCO kepada Walikota Banjarmasin atas kepemimpinannya dan inisiatifnya untuk mempromosikan dan melindungi serta memenuhi hak – hak para penyandang cacat di kota ini,” ucapnya.

Dalam acara tersebut yang menjadi perhatiannya, yakni kolaborasi yang terjalin sangat baik antar setiap Walikota di Indonesia, demi mempromosikan dan menyetarakan para penyandang disabilitas layaknya orang normal lainnya, tanpa harus melihat kekurangan.

Dan karena itu ia menyakini, UNESCO akan mendukung penuh setiap program yang dilaksanakan APEKSI ini. “Ada banyak hal yang terjadi di tingkat kota di Indonesia, kota-kota mengambil peran utama dalam mempromosikan hak-hak penyandang cacat dan karenanya ada jaringan Walikota untuk kota-kota inklusif di mana Banjarmasin adalah salah satu anggota paling aktif. Tetapi, kalian juga melihat sepanjang hari Walikota lain dari kota-kota lain yang datang bersama untuk membahas apa yang dapat mereka pelajari satu sama lain dan juga dari para penyandang cacat sendiri dan UNESCO dengan senang hati memfasilitasi kontak ini dan mendukung jaringan ini. Selain itu menurutnya sangat penting bagi kota, khususnya di Indonesia sebagai pionir untuk pembangunan, terutama kota inklusi, yang mana pembangunan-pembangunan tersebut bisa menunjang dan ramah terhadap difabel, seperti yang telah dilakukan Banjarmasin. Sangat penting bagi kota untuk memimpin, sebagai contoh ketika Banjarmasin melakukan sesuatu dalam hal mempromosikan akses fisik misalnya membuat lingkungan ruang fisik di mana para penyandang cacat tidak memiliki hambatan fisik untuk mendapatkan manfaat dari hal-hal yang sama seperti yang dilakukan orang lain. Kemudian itu menjadi contoh bagi kota-kota lain di Kalimantan Selatan dan juga di seluruh Indonesia dan itulah peran kota itu,” pungkasnya.

Selain UNESCO, Kota Banjarmasin juga bekerjasama dengan kota kita Surakarta, kaki kota Banjarmasin, Global Disability Inovation Hub, University Collage London dan GIZ Germany untuk mewujudkan kota Banjarmasin yang inklusif. Banjarmasin menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memenangkan *Global Urban Mobility Challenge* 2019 di Leipzig City, Jerman. Atas raihan penghargaan tersebut, Banjarmasin juga mendapatkan bantuan *Transformative Urban Mobility Initiative* (TUMI) sebesar Rp. 2 miliar untuk pembangunan infrastruktur kota inklusi bersama 9 kota lain dari seluruh dunia. “Hingga hari ini kita

masih mencoba terus melaksanakan kebijakan yang berkesesuaian dengan roadmap kota inklusi ini,” kata Ibnu.

Sebagai kerja nyatanya saat ini, Banjarmasin telah membangun infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Seperti dibangunnya trotoar ramah difabel hingga di perkantoran pemerintah juga dibangun sarana dan pra sarana khusus ramah difabel. Hal ini terlihat pada pembangunan pedestrian di sepanjang jalan Belitung, sepanjang jalan A. Yani km 2-6 Banjarmasin serta pembuatan toilet untuk kaum difabel. Adapula kampung inklusi yang dibangun di tingkat kelurahan. Sedangkan untuk pendidikan sudah ada puluhan SD dan SMP yang berbasis inklusi *dan dilengkapi angkutan umum gratis untuk para difabel.* klikkalsel.com/unesco-terkesan-perhatian-ibnu-sina-lindungi-hak-hak-penyandang-disabilitas/ (Fahrul, 2019)

3. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sebagai Perangkat Perjuangan Hak Disabilitas

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau disingkat PPDI dibentuk pada tanggal 11 maret 1987, berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. PPDI bersifat non partisan dan terbuka bagi seluruh organisasi sosial penyandang disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas tingkat nasional.

PPDI adalah payung bagi organisai sosial penyandang disabilitas, organisasi sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah

perjuangan, koordinasi, konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional.

Visi PPDI adalah terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Misi PPDI adalah sebagai berikut ini :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan isu disabilitas.
2. Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
3. Menyeimbangkan kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai warga Negara Indonesia.
4. Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efesiensi dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.
5. Memberdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berintegrasi.
6. Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran public sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat.

PPDI bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional.

Pembuatan trotoar ramah disabilitas yang ada di kanan dan kiri jalan mulai *flyover* sampai jalan A. Yani Km. 6 Banjarmasin dengan dana Rp. 17 miliar diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pejalan kaki dan tentunya untuk penyandang disabilitas oleh pemerintah kota Banjarmasin.

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) kota Banjarmasin, Slamet, bahwa pada tanggal 25 November 2019 lalu saat wawancara mengatakan menurut pengamatan pihaknya pemerintah kota Banjarmasin sudah membangun sesuai dengan standar keamanan internasional. Hal ini sebagai bentuk respon pemerintah atas permintaan PPDI untuk adanya akses trotoar yang baik, seperti yang kami sampaikan di saat Musrenbang beberapa waktu lalu,” imbuhnya.

Dalam hal ini, menurutnya pemerintah kota Banjarmasin sudah menuju ke arah apa yang pihak PPDI maksud dalam konteks inklusifitas di Kota Seribu Sungai.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Faktor Yang Menjadi Kendala Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Mengakses Lapangan Pekerjaan di Kota Banjarmasin

a. Aksesibilitas Fisik dan Non Fisik

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan :

Nama : Slamet Triyadi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 48 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Belitung, Banjarmasin Barat

Slamet Triyadi, ketua PPDI Banjarmasin mengatakan :

“Sebagai gambaran, kami sudah melakukan koordinasi ke pemerintah kota Banjarmasin menyangkut aksesibilitas ruang kerja dimana akses berupa fisik maupun nonfisik belum dikatakan sepenuhnya dapat di akses dengan baik. hal demikian bisa dilihat dari berbagai aspek yang salah satunya seperti pembangunan gedung, bangunan perkantoran, serta jalan belum dilakukan secara maksimal dan menyeluruh. Bahwa penyediaan berbagai layanan fasilitas yang mudah untuk diakses bagi para penyandang disabilitas bisa dikatakan masih minim diakibatkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah kota Banjarmasin.”

Mayoritas penyandang disabilitas di Banjarmasin merasa bahwa fasilitas umum di Banjarmasin sudah dikatakan mulai cukup nyaman. Meskipun sebagian penyandang disabilitas menganggap bahwa fasilitas umum di Banjarmasin sudah dapat diakses oleh mereka, namun sebagian lain pula mengatakan bahwa fasilitas umum yang mudah diakses dan ramah disabilitas jarang ditemukan oleh mereka. Dalam artian, beberapa fasilitas umum sudah memenuhi

kebutuhan tertentu penyandang disabilitas, meski sebagian besarnya tetap tidak dapat diakses.

Berdasarkan hasil wawancara dengan :

Nama : Muhransyah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 42 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : ASN

Alamat : Liang Anggang, Banjarbaru

Muhransyah, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia di Dinas Sosial kota Banjarmasin, mengatakan :

”Berkaitan dengan aksesibilitas, akses-akses sudah dilakukan melalui program dari dinas PUPR untuk bangunan gedung ataupun jalan. Namun, terkadang masyarakat kita ini yang tidak mengikuti imbauan dimana begitu dibuatkan jalan untuk akses penyandang disabilitas malah digunakan untuk parkir, seperti yang di Belitung. Ada *guiding block* hancur dirusak, makanya sepanjang jalan A.Yani dikasih pagar agar sepeda motor tidak bisa masuk. Contoh lainnya, di taman Kamboja aksesnya sekarang ditutup oleh pemko, karena sepeda motor masuk kedalam maka penyandang disabilitas tidak bisa mengakses. Ramp yang berada di taman-taman di kota Banjarmasin itu dibuat bukan untuk dinaiki sepeda motor melainkan untuk akses kursi roda.”

Ketika aturan yang dibuat itu dilanggar, akhirnya aksesnya ditutup yang menyebabkan tidak hanya motor yang dapat masuk bahkan kursi roda pun tidak bisa mengaksesnya. Perbenturan komunikasi antara masyarakat dengan sosialisasi Pemerintah

merupakan kendala yang sering kali terjadi. Miskomunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat non-disabilitas, menjadi sebuah realitas kesalahpahaman yang seharusnya bisa dicarikan solusinya. Sosialisasi yang terstruktur dan masif dari Pemerintah kepada masyarakat jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh, akan sangat efektif untuk mensosialisasikan aturan yang hendak diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan :

Nama : Rasyidi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 27 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kelayan B, Banjarmasin Selatan

Rasyidi, selaku salah satu warga penyandang disabilitas fisik yang ada di Kelayan B, mengatakan :

“Jika dikatakan bahwa Banjarmasin sudah mulai berbenah, maka ada dan tanpa itu pun kami sudah dari dulu diuntut untuk bisa mandiri, beradaptasi dengan keadaan kami. Namun jika benar seperti itu, maka kami juga sangat bersyukur bila dari pemerintah ada kesadaran atas kesetaraan dengan memperlihatkan kondisi kami dan hal inipun menjadi berita yang menggembirakan buat teman-teman difabel lainnya. Meskipun demikian, bangunan dan infrastruktur bagaimanapun nantinya, kami pun akan selalu membutuhkan yang namanya bantuan, seperti saya dengan kondisi cacat dikaki pasti kalau menggunakan alat transportasi seperti sepeda motor harus sepeda motor yang telah dimodifikasi sebelumnya semisal dengan roda tiga, nah hal yang demikian itu, lagi memerlukan biaya yang tidak sedikit juga.”

Selain infrastruktur secara umum, penyandang disabilitas fisik juga sangat membutuhkan bantuan atau media lain dalam memudahkan mobilitas pergerakan mereka sebagai contoh sepeda motor roda tiga. Informasi yang di dapatkan, hanya bengkel di Banjarbaru yang menyediakan pelayanan modifikasi untuk sepeda motor roda tiga. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat juga kurang atas dukungan yang bisa mengampu mobilitas para penyandang disabilitas terlihat dari kurang tersedianya bengkel modifikasi yang ada di dalam kota. Hal ini bisa menjadi bahan tolak ukur bagi program pemerintah untuk menyediakan serta membantu persoalan ini. Jika orang pada umumnya mau berangkat ke pasar dengan menggunakan sepeda motor, maka para penyandang disabilitas juga bisa berangkat ke pasar namun dengan sepeda motor roda tiga, bisa dengan tongkat, bisa dengan kursi roda dalam artian mereka memakai alat bantu tambahan (*Different Ability* / berbeda kemampuan). Ada 65% penyandang disabilitas keluar rumah mereka sebanyak 5-7 kali seminggu, untuk pergi ke sekolah, pusat pelatihan, dan tempat kerja. Sementara itu, 45% penyandang disabilitas mengatakan mereka tidak pergi ke tempat rekreasi, pusat perbelanjaan, atau tempat ibadah karena kondisi mereka. Penyandang disabilitas yang bekerja dari rumah memiliki ruang gerak lebih sedikit daripada orang-orang yang bekerja di luar rumah mereka, dan lansia serta anak-anak penyandang disabilitas

mebutuhkan pendamping untuk membantu mereka bergerak. Usia tua, ketergantungan pada pendamping, dan demotivasi dari keluarga juga masyarakat merupakan faktor-faktor yang menghambat mobilitas penyandang disabilitas, yang mengarah pada partisipasi yang rendah dalam masyarakat.

Kebanyakan penyandang disabilitas lebih suka berjalan atau menggunakan kursi roda (terutama penyandang disabilitas fisik), sisanya (29%) mengandalkan pendamping mereka untuk membantu mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain, dan kurang dari 1% penyandang disabilitas memakai roda transportasi modifikasi.

Ruang-ruang publik di dalam kota tentu sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Investasi untuk jalan dan bangunan lainnya agar inklusif dan mudah diakses adalah investasi bagi semua orang. Kurangnya desain yang inklusif dalam tatanan kota Banjarmasin telah menyebabkan kelompok penyandang disabilitas kesulitan untuk mengakses fasilitas dasar. Oleh sebab itu, maka keterbatasan mobilitas merupakan salah satu alasan mereka kesulitan didalam mengakses hal yang lebih lanjut lagi seperti pekerjaan. Situasi mereka diperparah lagi oleh kurangnya kesadaran dalam masyarakat setempat tentang kondisi sulit mereka saat ini.

Di Banjarmasin, akses dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan keterampilan masih sangat terbatas. Hanya 9% dari penyandang disabilitas yang memiliki akses profesional dan

pelatihan keterampilan seperti komputer, memijat, menjahit, memasak, kerajinan, bahasa isyarat, huruf braille, bahasa asing, dan kelas motivasi. Sebelumnya pusat pelatihan dari berbagai keterampilan dilakukan di Pelambuan, namun sekarang tidak berfungsi lagi dan bangunan ini sekarang digunakan sebagai kantor Dinas Sosial Provinsi karena kurangnya gedung pemerintah yang tersedia. Dengan keadaan demikian, penyandang disabilitas mengakui bahwa untuk mengakses pelatihan mereka harus menempuh perjalanan ke Banjarbaru. Sebuah kota yang terletak cukup jauh dengan kota Banjarmasin. Bahkan di sana, bahan pelatihan sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan lagi dengan situasi sehari-hari mereka saat ini yang mengakibatkan mereka kesulitan meningkatkan keterampilan untuk menyesuaikan diri dengan permintaan pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan :

Nama : Zainudin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 32 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Sungai Lulut, Banjarmasin Timur

Zainudin, penyandang disabilitas fisik warga Sungai Lulut, mengatakan :

“Mengikuti pelatihan keterampilan pada waktu itu sih pernah, hanya saja bagi saya pelatihan tersebut kelihatan setengah-setengah, tidak berkelanjutan disebabkan keterbatasan anggaran mungkin atau yang lainnya, sehingga keterampilan yang sudah kami kembangkan terkesan tidak diakomodir dengan baik. Lantas hal itu menyebabkan kami masih cukup kesulitan untuk mengekspresikan kemampuan apa saja yang kami miliki.”

Pelatihan yang tersedia masih sangat kurang dalam tahap pelaksanaannya yang belum rutin, menyebabkan keterampilan yang hendak dikuasai oleh para penyandang disabilitas tidak terpenuhi secara baik. Anggaran yang terbatas menjadi salah satu alasan akan kurangnya penyediaan sarana maupun prasarana pelatihan bagi para penyandang disabilitas untuk melatih kemampuannya.

Pada tahun 2017, Pemerintah kota Banjarmasin telah membuka sekitar 61 pasar tradisional, yang mana 46 diantaranya terletak di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Namun sayangnya, desain fisik dari pasar tradisional dalam kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga tidak bisa langsung diakses oleh penyandang disabilitas. Selain itu, daerah sekitar pasar pun dibangun tanpa pertimbangan yang matang akan kebutuhan penyandang disabilitas dari yang seharusnya pembangunan harus meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas pasar tradisional dalam meningkatkan mobilitas sehingga partisipasi para penyandang disabilitas dalam kegiatan perekonomian pun bisa terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan :

Nama : Andri

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 28 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pekapuran Raya, Banjarmasin Timur

“Saya merasa memang benar bahwa kota ini berpenampilan sebagai sebuah kota industri dan perdagangan. Pasar memang sudah ada di hampir setiap wilayah yang ada di kota Banjarmasin, akan tetapi ruang gerak kami masih sangat terbatas untuk bisa beradaptasi dan bersaing dengan masyarakat normal pada umumnya, sehingga hal tersebut menjadi stigma saya itu tidak memberanikan saya untuk bisa terjun dan bersaing dalam membuka usaha di pasar itu. Jujur saya belum pernah untuk memulai membuka usaha, hal itu karena sebelumnya saya sudah merasa pesimis dan tidak akan mampu bertahan dan berkembang didalamnya.”

Ketidakpercayadirian penyandang disabilitas merupakan masalah klasik yang menghambat mereka untuk mencoba bergerak lebih maju dari yang sebelumnya. Alasan keterbatasan baik itu fisiknya yang kurang normal menjadikan mereka hanya mampu mengakses pekerjaan yang bisa dikatakan tingkatan bawah saja sebagai contoh, pekerja kasar, serabutan, pekerja sambilan seperti berjualan ala kadarnya di rumahnya sendiri.

Sebagai kota besar yang mayoritas masyarakatnya sudah mampu menyesuaikan dengan kota-kota besar lainnya. Banjarmasin adalah salah satu kota yang terbilang cepat dalam beradaptasi dengan pertumbuhan zaman oleh sebab pengaruh teknologi yang terbilang sangat massif dipakai di kota ini. Akses komunikasi dan

layanan informasi menjadi penting dalam membantu dan memberdayakan para penyandang disabilitas dengan menyediakan informasi, teknologi, data, koneksi, dan lainnya. Sebagian lain penyandang disabilitas tidak memiliki perangkat komunikasi, sementara sebagian lainnya lagi mengakses komunikasi dan informasi melalui smartphone serta ponsel mereka. Dari total separuh dari penyandang disabilitas yang memiliki perangkat komunikasi setuju bahwa perangkat tersebut telah membantu masalah disabilitas mereka seperti membantu mereka berkomunikasi, berkerja, melakukan aktivitas, hiburan dan bahkan seperti pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan :

Nama : Indri

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 29 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Pasar Lama, Banjarmasin Tengah

“Saya memiliki smartphone android yang mana smartphone tersebut saya gunakan sebagai alat komunikasi dan informasi dengan saya membuat akun sosial media pribadi, seperti Instagram. Di Instagram, saya sesekali pernah untuk mencoba peruntungan di dalam mencari pekerjaan, akan tetapi ketika saya membuka beberapa platform di akun Instagram yang menjadi media informasi akan kesempatan kerja sebut saja seperti, *@lowongankerjabanjarasin*, *@lokerbanjarasin*, *@loker_banua* dan lainnya, saya menemukan fakta bahwa tidak ada sedikitpun peluang bagi

saya dengan kondisi saya seperti ini yang bertolak belakang dengan kehendak orang-orang yang memiliki usaha dan mereka yang sedang mencari tenaga kerja. Dari sini secara pribadi seolah berputus asa dalam memimpikan pekerjaan yang lebih baik, maka dari itu saya hanya bisa berdamai dengan keadaan saya yang ada dengan pekerjaan yang bisa saya lakukan seadanya asalkan itu halal saya sudah merasa tercukupi.”

Di era modern, segala sesuatunya sudah harus di tuntut untuk selalu serba cepat dalam segala aktivitas. Dengan pengaruh teknologi yang sudah mumpuni, orang-orang dapat melakukan rutinitas dengan mudah, baik itu yang bersangkutan dengan hal komunikasi dan informasi ataupun yang menyangkut ruang lingkup pekerjaan. Ketika melihat isu dimana masih banyak para pemilik usaha yang membuka kesempatan kerja tidak dengan kesadaran atas kesetaraan yang memungkinkan pekerjaan tersebut dapat diakses oleh para penyandang disabilitas, maka dapat dikatakan bahwa stigma masyarakat masih menganggap remeh para penyandang disabilitas dan bukan menjadi bagian prioritas yang mereka inginkan sebagai tenaga pekerja. Dilihat dari postingan beberapa akun Instagram diatas, rata-rata postingan yang di post memperlihatkan syarat dan prasyarat yang sama sekali tidak memungkinkan bahkan menutup peluang bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mengakses kesempatan kerja tersebut. Padahal, di zaman media sosial seperti sekarang, sangat membantu sekali apabila akun-akun dengan kategori seperti di atas ikut andil bersama dalam mengkampanyekan isu-isu disabilitas terkait lapangan pekerjaan.

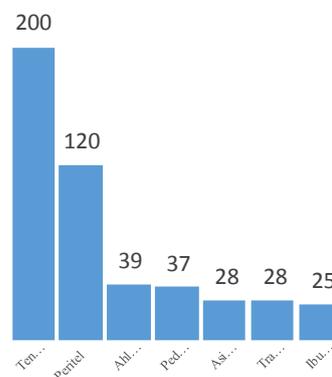
b. Lapangan Pekerjaan

Penyandang disabilitas terus menghadapi rintangan besar untuk memastikan mata pencaharian ekonomi dan pekerjaan. Tingkat pengangguran untuk penyandang disabilitas dalam usia produktif berada di atas 73% dan hampir 94% dari penyandang disabilitas memperoleh pendapatan dibawah upah minimum daerah. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi kerja penyandang disabilitas yang bekerja di gaji kurang dari upah minimum daerah.

Penyandang disabilitas umumnya bekerja di sektor informal. Hanya 3% penyandang disabilitas yang memiliki pekerjaan professional. Penyandang disabilitas mengalami prasangka dari masyarakat yang berasumsi mereka memiliki kapasitas dan keterampilan yang lebih rendah.

Gambar 4.6

Jenis Pekerjaan Penyandang Disabilitas



Gambar : Tujuh jenis pekerjaan teratas penyandang disabilitas di
Banjarmasin

Banjarmasin *Career Expo* 2019 yang berlangsung dari tanggal 22-24 April 2019 di taman Kamboja, Banjarmasin, menampilkan berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Tenaga Kerja Banjarmasin, ada 8.260 masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dan menerima PHK sejumlah 512 orang pada tahun 2018. Sementara hanya ada 1.200 lowongan pekerjaan dan terpenuhi 1.100 lowongan.

Disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Banjarmasin Priyo Eko, mengatakan : “Ada beberapa kendala sehingga masih adanya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Diantaranya yaitu disebabkan kurangnya informasi, latarbelakang pendidikan dan keahlian pencari kerja, serta kurang aktifnya perusahaan dalam melaporkan lowongan pekerjaan ke Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja. Expo ini untuk mempertemukan lowongan dan pencari kerja, baik yang difabel maupun non difabel,” jelas Priyo.”

Ada 40 perusahaan dengan 1.150 lowongan yang tersedia di *career expo*, menariknya, expo kali ini juga membuka rekrutmen untuk para pencari kerja difabel. Jika seluruh lowongan di expo ini jumlahnya tercapai, yaitu 1.000 lowongan tentu ini masih memenuhi 25% jika dibandingkan dengan jumlah angka pengangguran yang ada di kota Banjarmasin.

Sampai bulan April tahun 2019, terdata 93 orang yang terkena PHK. Priyo pun berharap agar seluruh 1.425 perusahaan yang ada di Banjarmasin bisa membantu para pencari lapangan pekerjaan sekaligus memfasilitasi pekerjaan untuk penyandang disabilitas. Sejauh ini perusahaan yang menerima pegawai dengan penyandang disabilitas masih bisa dihitung jari terutama di Banjarmasin, seperti Transmart, Honda, dan PDAM Bandarmasih.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, mengatakan : “Meski lowongan tahun ini menipis dari angka yang mencapai 1.500

lowongan pekerjaan, Ia berharap agar perusahaan yang ada mampu menerima para pencari kerja difabel. Sebab berdasarkan UU tenaga kerja bahwa 2% dari tenaga kerja yang ada di sebuah perusahaan, adalah difabel.”

Koordinator program SABDA (LSM yang menaungi kaum disabilitas) Fatum Ade, mengatakan : “Menegaskan bahwa perusahaan tidak perlu ragu dalam memberikan kesempatan bagi penyandang difabel, terutama yang sering beralasan terkendala oleh bahasa. Bukan hal yang tidak mungkin menurutnya jika sebuah perusahaan untuk bisa mengerti posisi kaum disabilitas, serta dalam expo ini juga akan terlihat sejauh mana kesiap atau ketidaksiapan sebuah perusahaan untuk menjadi sebuah akses bagi kaum disabilitas karena hak yang paling sulit dipenuhi dalam pemenuhan hak disabilitas adalah ketenagakerjaan.”

Fitriah yang merupakan salah satu peserta pencari kerja, mengatakan : “Akhirnya keinginannya bisa terwujud untuk bisa melamar di sebuah perusahaan swasta yang saat ini sedang berkembang. Bermodalkan ijazah SMP fitri mengaku tetap optimis bisa mendapatkan pekerjaan sesuai harapannya. Fitri berharap dengan adanya kesempatan tersebut, bisa bermanfaat dan diterima dalam upaya mereka menyamaratakan hak yang sama bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan tetap pada umumnya. Fitri yang juga berprofesi sebagai bendahara Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) kota Banjarmasin, juga sangat menginginkan agar Job Fair untuk difabel ini bisa terus dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.” (Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Banjarmasin, 2019).

Tabel 4.2

Partisipasi Kerja Penyandang Disabilitas

No.	ISU	IMPLIKASI	REKOMENDASI
1	Rendahnya partisipasi kerja penyandang disabilitas di Banjarmasin. Mayoritas penyandang disabilitas yang bekerja digaji kurang dari upah minimum daerah.	Tingkat pengangguran untuk penyandang disabilitas dalam usia produktif berada di atas 73% dan hampir 94% dari penyandang disabilitas memperoleh pendapatan di bawah upah minimum daerah	Meningkatkan peluang kerja bagi penyandang disabilitas dan memperkuat regulasi untuk mendukung kesejahteraan mereka
2	Penyandang disabilitas umumnya bekerja di sektor informasi, hanya 3% penyandang disabilitas yang	Persyaratan pendidikan formal menciptakan kendala terbesar bagi penyandang disabilitas di Banjarmasin saat	Kurangnya peluang kerja pengembangan kapasitas dan keterampilan diperlukan untuk memenuhi

	memiliki pekerjaan profesional	melamar pekerjaan	persyaratan pemberi kerja
3	Kurangnya pelatihan keterampilan teknis untuk penyandang disabilitas	Hanya 9% dan penyandang disabilitas yang telah mengakses pelatihan kejuruan dan keterampilan teknis	Memfasilitasi akses untuk pelatihan penyandang disabilitas dengan menyediakan layanan pendukung, akomodasi yang layak, dan mobilitas

Sumber : Kota Banjarmasin, Sebuah Profil Kota Ramah Disabilitas (2019)

Slamet Triyadi Ketua PPDI Banjarmasin mengatakan :

“Kami juga sudah menyampaikan data yang kemudian juga dapat direspon secara umumnya baik oleh pemerintah dan mereka sudah berupaya baik dengan apa adanya menyampaikan bahwa pembangunan belum sepenuhnya bisa akses dikarenakan anggaran yang terbatas. Terkait akses informasi, Penerimaan mereka pun juga sudah sangat baik, bersedia berkoordinasi bagaimana kalau ada lowongan-lowongan pekerjaan kami selalu diberikan informasi, salah satunya ketika awal tahun 2020 kemarin Dinas Ketenagakerjaan mengadakan kegiatan *Job Fair* dengan melibatkan para kaum difabel untuk menemukan pekerjaan apa yang cocok dengan kemampuan beserta

keterampilannya. Stigma masyarakat pada awalnya sampai sekarang masih ada yang negatif, mereka bilang disabilitas itu tidak mampu, mereka bilang disabilitas itu harus dikasihani adalah sebuah persoalan yang masih ada sampai sekarang walaupun pelan-pelan kami berusaha untuk meyakinkan mereka dengan berbagai kampanye atau berbagai macam cara dan sedikit demi sedikit mereka sudah mulai paham apa itu disabilitas bahwa tidak selamanya dikasihani, tidak selamanya harus dibantu, sampai sekarang sudah lumayan lebih banyak yang mengerti dan sedikit yang tidak paham dengan disabilitas dengan perbandingan sekitar 60% yang memahami dan sebaliknya 40% yang belum memahami.. Bukan hanya terkendala di intern para penyandang disabilitas itu saja, akan tetapi dari luar juga mempengaruhi, diantaranya masyarakat masih memiliki stigma yang negatif walaupun sudah agak berkurang otomatis kalau masyarakat itu mempunyai stigma negatif, itupun akan berakibat kepada para penyedia pekerjaan yang mana mereka masih memandang fisik kami bukan memandang kemampuan kami, walaupun kami memiliki ijazah mereka tidak menilai itu.”

Kendala lain yang berkenaan dengan aksesibilitas, adalah stigma masyarakat yang memandang mereka bukan dari kemampuan, akan tetapi fisik mereka. Tentu hal demikian sangat mempengaruhi bahkan mengurangi nilai-nilai kemanusiaan yang dalam cita-cita kebangsaan adalah hal yang harus dijunjung tinggi. Maka dari itu, penanaman nilai-nilai atas kesetaraan dan kebebasan hak harus dijamin serta dengan penerapan hukum yang lebih kuat lagi untuk dijalankan.

UU Nomor 8 Tahun 2016 mengenai penyandang disabilitas menyatakan hak-hak penyandang disabilitas untuk partisipasi politik. Memilih dan mencalonkan diri untuk jabatan dipemerintahan, menyatakan aspirasi politik mereka baik secara verbal dan tertulis,

berpartisipasi secara aktif dalam sistem pemilihan, membentuk dan bergabung dengan organisasi masyarakat sipil/penyandang disabilitas (DPO) / partai politik. Dalam pelaksanaan tersebut, pemerintah harus menyediakan fasilitas yang diperlukan agar penyandang disabilitas dapat secara aktif terlibat dalam kegiatan politik.

Berdasarkan wawancara bersama Slamet Triyadi, Ketua PPDI Banjarmasin, mengatakan :

“Dalam hal penyampaian aspirasi, kalau untuk masuk ke dalam sistem, misalnya yang marak saat ini seperti politik, kami sih ada, kami ingin berkecimpung didalamnya. Tapi ya tadi, yang mempunyai kemauan seperti itu tidak banyak terlebih mereka yang lahirnya dari tahun 80-an ke belakang befikirnya dapat dikatakan minder. Kalau bersaing didalam sistem sih ingin juga menjadi pegawai negeri, ingin juga menjadi walikota, menjadi dewan, tapi karena untuk menuju kesana harus mempunyai ijazah yang standar dan kami rata-rata ijazahnya berada dibawah standar. Jadi untuk masuk kesana kami memerlukan perjuangan yang luarbiasa.”

Pada pemilihan umum 2019, hanya sekitar 900 penyandang disabilitas yang awalnya terdaftar sebagai pemilih yang memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin. Sementara itu, ada 3.297 penyandang disabilitas yang berhak memilih lebih dari tiga kali lipat jumlah pemilih terdaftar. Hasil survei yang tepat waktu lalu dilakukan lagi oleh KPU, dan semuanya terdaftar setelah dilakukan pemeriksaan silang dan pemutakhiran. Selain itu ada satu kandidat penyandang disabilitas yang mencalonkan diri dalam pemilihan calon kepala daerah 2019.

Pasrtisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan politik sangat penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan memenuhi hak-hak politik mereka.

Tabel 4.3

Partisipasi Politik dan Keterlibatan Bermasyarakat

No.	Isu	Implikasi	Rekomendasi
1.	<i>Database</i> yang tidak akurat tentang penyandang disabilitas	Banyak penyandang disabilitas tidak terdaftar sebagai pemilih yang sah	Meningkatkan metode pengumpulan data yang ada dan berkolaborasi dengan organisasi lain mis. Organisasi masyarakat sipil dan penyandang disabilitas (CSO, DPO)
2.	Penyandang disabilitas jarang terlibat dalam kegiatan sosial di kelurahan dan kotanya	Penyandang disabilitas dilupakan dalam proses pembuatan keputusan	Meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, baik di tingkat kelurahan maupun kota

3.		Program – program kelurahan dan kota tidak memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melibatkan penyandang disabilitas
----	--	--	--

Sumber : Kota Banjarmasin, Sebuah Profil Kota Ramah Disabilitas

(2019)

2. Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Kebijakan untuk Kemudahan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Fisik

a. Lembaga Pendidikan Sebagai Sarana Pembentuk Fungsi Sosial

Berdasarkan wawancara dengan Slamet Triyadi Ketua PPDI

Banjarmasin, mengatakan :

“Perjuangan hak-hak atas disabilitas tidaklah berjalan mulus “seperti apa yang diharapkan. Pertama, dari internal disabilitas itu sendiri, karena disabilitas itu kebanyakan dikota Banjarmasin masih didominasi produk lama, ijazahnya kebanyakan tidak memenuhi standar untuk pencari kerja. Kebanyakan disabilitas di kota Banjarmasin adalah disabilitas daksa dan sensorik. Tahun 80-an ke bawah, penyebab disabilitas adalah karena penyakit, salah asuh, kurang mengertinya ibu hamil dalam menjaga kandungannya yang pada akhirnya banyaklah generasi disabilitas. Mulai tahun 80-an kesini mulai berkurang artinya generasi difabel itu tidak banyak karena semakin kesini masyarakat sudah mulai semakin paham. Adapun kendala orang-orang disabilitas yang lahir di tahun 80-an kebawah adalah, masih sulitnya upaya dalam menempuh pendidikan, apalagi yang ekonomi

orangtuanya dibawah rata-rata bahkan tidak dapat sekolah sama sekali. Mereka memahami untuk bagaimana berkumpul itu sulit, bagaimana harus mengadvokasi diri sendiri itu sulit, bagaimana harus memahami pentingnya belajar dan pekerjaan itu sangatlah sulit, sehingga hal demikianlah yang menjadi kelemahan dasar para penyandang disabilitas yang ada di kota Banjarmasin.”

Bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa pendidikan adalah syarat utama pada masa kini sebagai jalan untuk mencari pekerjaan. Status pendidikan seseorang merupakan hal yang wajib dimiliki sebagai bukti dengan catatan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Lebih dari setengah anak-anak dan remaja penyandang disabilitas usia sekolah tidak bersekolah. Mayoritas penyandang disabilitas di Banjarmasin berusia 15 tahun belum pernah bersekolah, ataupun putus sekolah hanya 30% dari penyandang disabilitas yang lulus sekolah dasar dan 63 dari 3.468 penyandang disabilitas berusia 15 ke atas yang lulus universitas. Dari statistik yang tersedia, kemungkinan perempuan penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan lebih kecil daripada laki-laki penyandang disabilitas, dimana lebih dari 65% dari perempuan penyandang disabilitas tidak memiliki pendidikan dibandingkan dengan 38% untuk laki-laki.

Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan :

“Saat pertama kali berupaya awal untuk menerapkan sekolah inklusif, ada banyak perlawanan dari masyarakat, siswa non-disabilitas dan orangtua mereka. Dinas Pendidikan Kotamadya dan sekolah-sekolah bekerja sama untuk terus

meningkatkan kesadaran sehingga siswa dengan disabilitas dapat diterima dalam masyarakat kita dan terutama di sekolah-sekolah. Kami dalam proses meningkatkan layanan pendidikan inklusif dengan mengembangkan kemampuan guru kami, membentuk forum guru, dan menyediakan sekolah fasilitas-fasilitas yang akomodatif, termasuk mengubah ramp, susunan, kamar mandi yang ada menjadi desain yang lebih inklusif.”

Tabel 4.4

Akses Pendidikan Penyandang Disabilitas

Tingkatan	TK	SD	SMP	SMA
Jumlah Sekolah	9	31	7	4
Jumlah Guru	1	1	1	0

Sumber: Dinas Pendidikan Banjarmasin (2019)

Pemerintah kota Banjarmasin telah berupaya untuk menciptakan sebuah kota yang inklusif dan dapat diakses penyandang disabilitas khususnya dalam hal akses pendidikan. Pada tahun 2017, Banjarmasin menyediakan 42 sekolah inklusif, dan 51 sekolah inklusif serta 7 sekolah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus pada tahun 2018. Kota ini telah membuat kemajuan dengan membangun sekolah inklusif, memberikan guru pelatihan untuk mengajar inklusif (Program Guru Pendamping Khusus), dan membentuk Forum Komunikasi Pendidikan Inklusif (FKPI) di bawah kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan pusat komunikasi untuk semua sekolah inklusif di seluruh provinsi. Sekolah-sekolah inklusif di Banjarmasin

mengandalkan prinsip bahwa semua anak harus menerima pendidikan yang sama dan menjadi bagian dari lingkungan belajar yang sama, terlepas dari perbedaan mereka. Tapi implementasinya dari prinsip tersebut dilakukan hanya sejauh memasukkan siswa dengan disabilitas di kelas yang sama sebagai siswa biasa, tanpa mencoba untuk membuat perubahan struktur dalam kurikulum atau strategi pengajaran mereka. Beberapa sekolah umum yang mengklaim sebagai inklusif mungkin inklusif secara teori, tetapi nyaris tidak demikian dalam praktiknya. Tantangan ini terus ada karena kurangnya guru yang berkualitas dan berdedikasi serta fasilitas yang akomodasi dan mudah diakses di sekolah.

Meskipun fasilitas sudah mulai disediakan oleh pemerintah untuk mengakomodasi akses ke pendidikan bagi penyandang disabilitas, anak-anak disabilitas cenderung memilih sekolah di dekat rumah mereka untuk mengurangi biaya transportasi. Akibatnya, banyak anak-anak disabilitas di Banjarmasin masuk ke sekolah-sekolah yang tidak inklusif.

Dari total 761 penyandang disabilitas usia sekolah, hanya 39,2% yang bersekolah, sementara itu 7 sekolah yang sudah ada untuk siswa dengan kebutuhan khusus, yang terletak di seluruh Banjarmasin, telah memenuhi syarat minimum sesuai dengan Peraturan Menteri No.33/2008 mengenai standar Fasilitas dan Infrastruktur untuk Sekolah Kebutuhan Khusus. Selain itu, 51

sekolah inklusif siap untuk mengakomodasi penyandang disabilitas usia sekolah. Adapun masalah dan hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Banjarmasin di sekolah, yang mengakibatkan lebih dari 50% dari mereka tidak menerima pendidikan formal.

Tabel 4.5

Masalah dan Kendala Pendidikan

No.	Isu	Implikasi	Rekomendasi
1	Kurangnya Akses ke Sekolah	Sebagian besar penyandang disabilitas di Banjarmasin berusia 15 tahun ke atas belum mulai sekolah atau telah putus sekolah lebih dari setengah anak – anak dan remaja penyandang disabilitas usia sekolah tidak bersekolah	Menyediakan sistem transportasi yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas terutama bagi anak – anak usia sekolah

2	<p>Hak-hak penyandang disabilitas lebih berpeluang untuk mengalami perundungan (<i>bullying</i>) di sekolah</p>	<p>Prasangka terhadap anak-anak penyandang disabilitas memperkuat lingkaran tak berujung dari rasa malu, rendah diri, dan pengucilan sosial secara keseluruhan</p>	<p>Meningkatkan kesadaran publik, termasuk di kalangan orang tua dengan anak-anak penyandang disabilitas, tentang hak dan perlakuan yang tepat untuk anak-anak mereka.</p>
3	<p>Keluarga dengan anak-anak disabilitas cenderung menyembunyikan anak-anak mereka di rumah. Ini sebagian besar disebabkan oleh penolakan dari</p>	<p>Sekolah untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus membuat siswanya kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan anak-anak non-disabilitas. Anak-anak</p>	<p>Menciptakan forum dan kelompok pendukung bagi keluarga dengan anak-anak penyandang disabilitas untuk berbagi motivasi dan pemahaman tentang kondisi</p>

	<p>orang tua dengan anak-anak non-disabilitas yang memperlakukan seolah-olah disabilitas adalah penyakit menular yang bisa membahayakan anak-anak mereka</p>	<p>disabilitas akibatnya tidak dapat berpartisipasi penuh didalam masyarakat</p>	<p>anak-anak mereka.</p>
4	<p>Kurangnya guru yang memenuhi syarat dan fasilitas penunjang di sekolah inklusif</p>	<p>Guru seringkali memiliki keterbatasan teknik mengajar dan strategi (visual, pendengaran, kinestetik, dll) dalam merancang silabus</p>	<p>Menyediakan akomodasi pendukung, mengembangkan sistem dukungan dan lingkungan belajar yang mudah diakses. Ini sangat penting</p>

			untuk memenuhi prinsip-prinsip pendidikan inklusif
5	Kurangnya fasilitas sekolah dan infrastruktur yang memadai untuk penyandang disabilitas	Desain bangunan sekolah, infrastruktur dan fasilitas yang sudah ada belum sesuai dengan standar inklusivitas	Mendesain atau merancang ulang gedung sekolah, infrastruktur, dan fasilitas sesuai dengan konsep desain universal

Sumber : Dinas Pendidikan Banjarmasin (2019)

b. Pemenuhan Mobilitas dan Keterampilan untuk Mewujudkan Hak-Hak Dasar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhransyah, selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia di Dinas Sosial kota Banjarmasin, mengatakan :

“Dinsos memberikan bantuan berupa alat semisal kursi roda dan tongkat, namun tidak banyak sebab anggaran yang terbatas. Bantuan lainnya melalui kemensos yakni asistensi sosial penyandang disabilitas. Namun ditahun 2021 bantuannya harus melalui lembaga dengan sebutan LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial). Karena keterbatasan anggaran program dinsos tidak terlalu banyak, paling dihari besar disabilitas dinsos memberikan paket sembako. Selain bantuan demikian, dinsos melakukan fungsi rehabilitasinya untuk mengembalikan fungsi sosial ara penyandang disabilitas dengan cara membantu mobilitas dan keterampilan para

penyandang disabilitas agar bisa mandiri tidak bergantung kepada orangtua, keluarga karena suatu saat mereka pasti sendiri. Selain itu, pada tahun 2021 nanti dinsos juga melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas yang terlantar tidak memiliki keluarga namun secara stimulan saja tidak sepenuhnya. Memang sulit karena terkadang dari merekanya yang tidak mau, orang tuanya tidak mau melepas, atau dianya sendiri. Sebenarnya keluarganya harus memberikan keyakinan, memberikan semacam pencerahan bahwa mereka suatu saat akan sendiri bisa karena orangtuanya suatu saat akan meninggal. Tanpa terkecuali mereka yang disabilitasnya cacat berat, itu memang tidak bisa dipaksakan buat direhabilitasi lagi. Dalam artian mereka sudah tidak bisa apa-apa lagi, termasuk yang mengalami masalah gangguan mental maka tinggal keluarganya saja lagi yang harus mampu membinanya.”

Dinas Sosial dalam fungsinya, baik sebagai penyalur bantuan sosial ataupun penyalur bantuan alat usaha, sudah menjalankan kewenangan berdasarkan prosedur yang ada. Selain fungsi di atas, Dinas Sosial juga menjalankan fungsinya sebagai pusat rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dalam mengembalikan fungsi sosialnya. Adapun kendala dalam proses penyaluran yang dihadapi berdasarkan informasi ialah mengenai status penerima bantuan yang kurang selektif baik yang terjadi karena keteledoran penyelenggara, ataupun calon-calon penerima bantuan yang memaksakan seharusnya yang bukan menjadi haknya.

